

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdurrahman, Muslan. 2009. *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum Indonesia*. Malang: UMM Press.
- Amiruddin, Zainal Azikin. 2016. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Danusaputro, Munadjat. 1980. *Hukum Lingkungan Buku I: Umum*. Bandung: Binacipta.
- Dahuri, Rokhmin. 2003. *Keanekaragaman Hayati Laut: Aset Pembangunan Berkelanjutan Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hardjasoemantri, Koesnadi. 2000. *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- HR, Ridwan. 2011. *Hukum Administrasi Negara: Edisi Revisi*. Rajawali Pers.
- HR, Ridwan. 2013. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- H. Kordi K., M.Ghufran. 2012. *Ekosistem Mangrove: Potensi, Fungsi dan Pengelolaan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mertokusumo, Sudikno. 1986. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Mertokusumo, Sudikno. 2010. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Mujad, M.Hadin. 2015. *Hukum Lingkungan: Sebuah Pengantar untuk Konteks Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Mukti Fajar, Yulianto Akhmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Murhaini, Suriansyah. 2012. *Hukum Kehutanan Penegakan Hukum terhadap Kejahatan di Bidang Kehutanan*. Yogyakarta: CV Aswaja Presindo.
- Nybakken. 1992. *Biologi Laut Suatu Pendekatan Ekologis*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Pudji Purwanti, Edi Susilo, Erlinda Indrayani. 2017. *Pengelolaan Hutan Mangrove Berkelanjutan*. Malang: Universitas Brawijaya Press (UB Press).
- Redi, Ahmad. 2014. *Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Salim, Emil. 1982. *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta: Mutiara.

Salim, Emil. 2020. *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)*. Yogyakarta: CV. Budi Utama.

Soekanto, Soejono. 2016. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grasindo Persada.

Saleng, Abrar. 2004. *Hukum Pertimbangan*. Yogyakarta: UII Press.

Yunus Wahid, A.M. 2014. *Pengantar Hukum Tata Ruang (Cetakan Pertama)*. Jakarta: Prenadamedia Group.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Peraturan Menteri Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barru Tahun 2011-2031.

C. Karya Ilmiah

Rahmatullah Qamal, A. Ibnu. "Jurnal Environmental Science." *Perubahan Luas dan Kerapatan Hutan Mangrove Pulau Pannikiang Kabupaten Barru*. 1.2 (2019)

Muazzin, Tinianuz. "Alih Fungsi Hutan di Kabupaten Aceh Tamiang." 12.3 (2010)

D. Web

Kompas (2003, 30 Januari). *Dilindungi Mangrove Masih Terancam*. Dikutip 16 Juli 2019 dari https://regional.kompas.com/read/2013/01/30/03291548/dilindungi_mangrove.masih.terancam.

KBBI. *Pengertian Wewenang*. Dikutip 16 Agustus 2019 dari <http://kbbi.web.id/wewenang>.

Penegakan Hukum. Dikutip 16 Agustus 2019 dari <http://digilib.unila.ac.id/2827/12/BAB%2011.pdf>.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Dikutip 16 Agustus 2019 dari <https://karyatulisilmiah.com/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-penegakan-hukum/>.

Zonasi Hutan Mangrove. Dikutip 8 Juni 2021 dari <https://hernandeaff.wordpress.com/2016/02/28/zonasi-hutan-mangrove/>.

Teori Penegakan Hukum. Dikutip 16 Agustus 2019 dari <https://masalahukum.wordpress.com/2013/10/05/teori-penegakan-hukum/>

Gambaran Umum Kabupaten Barru. Dikutip 20 Oktober 2020 dari <http://barrukab.go.id/gambaran-umum-kabupaten-barru/>